

## Pelatihan Lanjutan *Public Relation*, Fotografi dan Cameramen Diikuti Anggota Bidhumas Polda



Kadiv Humas Mabes Polri, IRJEN POL. Drs. H. SISNO ADIWINOTO, MM memberikan ucapan kepada peserta usai membuka Latihan PR dan Fotografer Humas Polri.

**P**erkembangan Teknologi dan Informasi yang begitu pesat dan canggih telah mempengaruhi kemajuan lingkungan strategis secara global, regional dan nasional sampai kewilayah terpencil sekalipun. Derasnya arus informasi yang mengalir sangat cepat seakan telah memperpendek jarak dan waktu serta batas-batas wilayah, sehingga setiap manusia, warga masyarakat dan atau Institusional dapat dengan cepat mengakses berbagai informasi tersebut. Polri sebagai Institusi Negara dalam mengemban fungsinya sesuai amanat UU No. 2 tahun 2002, akan senantiasa berhadapan dengan berbagai tantangan situasional yang berhubungan dengan informasi beserta eksesnya sehingga siap atau tidak, maka Polri harus selalu dalam posisi sebagai sasaran bidikan/sorotan Media Pers selaku sumber informasi Kepolisian. Dihadapkan pada tantangan dimaksud, sejalan dengan pengelolaan dan dokumentasi informasi Kepolisian, maka diperlukan suatu teknik pengerjaan yang baik, sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia yang tedidik dan terlatih. Agar dapat menghasilkan suatu karya atau dokumentasi yang baik maka diperlukan juga keahlian yang

cukup dalam hal teknik pengambilan gambar serta teknik pengeditannya.

Akhir-akhir ini sering kita dapati pemberitaan media massa, khususnya menyangkut berita tentang kiprah Polri yang cenderung semakin mengabaikan nilai-nilai berita, sehingga seakan-akan terjadi "Perang Informasi" atau "Perang Opini". Oleh karena itu perlu adanya peran dari pengambilan fungsi kehumasan untuk dapat segera menangkul berbagai pemberitaan yang dapat menyesatkan masyarakat pada umumnya, dan merugikan Polri pada khususnya, demikian antara lain ungkapan Kadivhumas Polri didepan peserta Pelatihan Lanjutan *Public Relation*, *Fotographi* dan *Cameramen* yang dilaksanakan di Gedung Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA) di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Kadivhumas Polri mengatakan bahwa "penyampaian informasi dengan benar dan akurat kepada masyarakat merupakan salah satu wujud tanggung jawab Polri dalam menciptakan situasi yang kondusif, sekaligus merupakan upaya untuk memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera Tata Ten-tram Karta Raharja". Seiring derasnya arus informasi dan komunikasi sebagai imbas dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang terjadi saat ini, maka kepada kita sebagai pengemban fungsi Humas dilingkungan Polri, dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan setiap dinamika perkembangan yang terjadi yakni antara lain dengan pemantapan ketrampilan dibidang *Public Relations*. Seyogyanya insan Polri bersama-sama menumbuhkan rasa kepedulian terhadap penyampaian informasi yang positif kepada masyarakat, dengan senantiasa berusaha keras untuk mengeleminir setiap isu yang dapat menyulut perpecahan, meresahkan masyarakat serta membahayakan keutuhan Bangsa. Sehingga melalui pelatihan tersebut, diharapkan personal Polri bisa lebih terpacu untuk selalu dapat menyampaikan informasi yang benar dan akurat, selain itu tetap menharapkan kaidah jurnalistik yang baik dan professional dalam meliput kegiatan Kepolisian, sehingga nantinya aparat Polri semakin sadar bahwa dia harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga semakin sadar bahwa Polri mempunyai tanggungjawab yang cukup berat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Maksud dan tujuan Pelatihan dimaksud adalah untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Polri mengemban fungsi Kehumasan sekaligus menambah wawasan tentang *Public Relation* serta keterampilan di bidang Jurnalistik dan Cameramen. Selain itu agar SDM pengemban fungsi Humas dapat mengembangkan pemahaman dan meningkatkan keterampilan mengenai proses penciptaan produksi audio visual mulai dari mewujudkan sebuah gagasan ke dalam perencanaan/naskah, pelaksanaan produksi dan proses pasca produksi (editing). Jajaran Polri khususnya yang mengemban fungsi kehumasan dapat lebih memahami bahwa pada hakekatnya tugas kehumasan adalah memberi pelayanan kepada masyarakat disatu sisi, sementara disisi lain merupakan ujung tombak penyebaran informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut seluruh kegiatan Polri. Peserta untuk pelatihan Foto Jurnalistik dan Kamerawan Editing masing-masing 30 orang dari anggota Bidhumas Polda. Materi yang diberikan adalah *Public Relation*, *Photo Jurnalistik*, *Cameramen* dan *Editing*\*\*\*



# Optimalkan Peran PR

## Dalam Rangka Memasyarakatkan Kinerja Polri Guna Membangun Kepercayaan Masyarakat

Polri saat ini sedang mendapat perhatian besar, dari berbagai kelompok lapisan masyarakat, instansi pemerintah serta swasta baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Perhatian ini suatu hal yang wajar, mengingat di dalam demokrasi dan kebebasan berpendapat Polri merupakan institusi yang diharapkan mampu mengawal kehidupan demokrasi dan kebebasan berpendapat agar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan atau mengganggu tercapainya tujuan nasional yaitu masyarakat aman, adil, makmur dan sejahtera demikian antara lain amanat Kapolri pada upacara pembukaan Rakernis Divhumas Polri beberapa waktu lalu bertempat di Rupattama Mabes Polri Jakarta.

Pada kesempatan yang sama Kapolri mengatakan bahwa perhatian besar terhadap Polri ini seringkali

nurut kacamata publik. Namun betapa banyak dikesampingkannya usaha dan kerjakeras Polri ketika berhasil merealisasikan tugas pokoknya, dibidang pelayanan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal ini terjadi antara lain karena tekanan opini negatif yang terbentuk dari pemberitaan yang tidak berimbang atau tidak obyektif yang dilakukan oleh media massa. Kondisi ini tentu akan menimbulkan citra negatif dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri apabila dibiarkan. Oleh karena itu untuk menetralsisir dan meminimalisir kondisi tersebut diatas diperlukan tugas dan peranan Divisi Humas Polri beserta jajarannya baik yang ada di Mabes Polri maupun yang ada disatuan kerja masing-masing Polda untuk meningkatkan kemampuan dan mengambil peran proaktif

tidak bisa diabaikan lagi, oleh karena itu Divisi Humas Polri merupakan corong untuk membentuk opini bagi upaya membangun citra Polri dituntut mampu mentransformasikan dan menjabarkannya secara logis, rasional, *capable*, bertanggung jawab dan transparan setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kesemuanya dapat dipahami, dimengerti dan diakui kebenarannya oleh masyarakat dan berbagai pihak. Hubungan antara Humas baik yang dipusat maupun daerah dengan rekan-rekan dari media massa sangat penting sekali, terlebih di era reformasi. Dimana masyarakat menghendaki kebebasan transparansi dan sebagainya, bahkan sering disampaikan oleh Presiden atau oleh berbagai pejabat pada setiap kesempatan termasuk para Duta Besar diluar negeri bagaimana mereka menyaksikan kebebasan pers kita. Sebagai informasi pada pimpinan Redaksi dan rekan-rekan wartawan pimpinan Polri yakin sudah banyak mengetahui pada saat sekarang ini Polri sedang mengembangkan satu *strategi community policing*. *Community Policing* dimaksudkan untuk memperankan masyarakat bukan sebagai obyek tapi sebagai subyek bagaimana masyarakat menangani masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat, sehingga tidak akan menjadi akumulatif menjadi gangguan keamanan lalu kita tidak tangani sejak hulunya. Strategi ini penting sekali, kita tahu bahwa di Polisi kita mengenal hakekat ancaman. Hakekat ancaman pada dasarnya ada tiga. Pertama faktor korelatif kriminologien; sumber-sumber kerawanan yang bisa muncul dari berbagai aspek kehidupan misalnya yang bisa muncul masalah ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, Hankam dan sebagainya. Dari politik misalnya dengan sistem politik sekarang, Pilkada misalnya bisa muncul terjadi kerawanan-kerawanan benturan massa antar para pendukung para calon-calon kepala daerah yang ada didaerah. Bila Polisi, masyarakat tidak mewaspadaai ini biarkan saja akhirnya akan bergulir menjadi munculnya gangguan-gangguan keamanan. Kalau dari awal Bisa ditangani dengan baik itu tidak akan muncul. Banyak hal-hal bisa diselesaikan dengan masyarakat untuk menangani sejak hulu supaya tidak muncul menjadi gangguan yang besar. Kedua Polis Hazard, adalah suatu potensi kalau tidak kita amankan akan menjadi gangguan keamanan.



Kapolri Jenderal Sutanto didampingi Kadiv Humas Mabes Polri, IRJEN POL. Drs. H. SISNO ADIWINOTO, MM berdialog dengan peserta.

dirasakan sebagai sorotan yang tajam dan tidak berimbang terhadap kinerja yang ditampilkannya, hingga ada fenomena menarik yang dapat kita rasakan tentang betapa gencarnya tanggapan, kritikan, celaan yang ditujukan kepada institusi Polri. Ketika ada beberapa oknum Polri yang melakukan tindakan terpuji atau dipandang negatif me-

dalam pengumpulan dan pengkajian informasi-informasi kepolisian khususnya dalam mensinkronisasikan dalam kepentingan institusi serta menginformasikannya secara terarah pada publik dan media sehingga dapat terwujudnya opini masyarakat yang menguntungkan bagi institusi Polri.

Pemanfaatan media semakin terasa sangat diperlukan dan sudah



Ini ditangani dengan tugas-tugas Kepolisian dengan penjagaan, pengawasan, patroli dan sebagainya. Ketiga adalah ancaman faktual yang sudah muncul menjadi gangguan keamanan, masalah ini harus ditangani dengan tindakan penegakan hukum, dahulu dikenal dengan langkah-langkah represif.

Sebagai penjabaran dari *community policing* pada 1 Juli 2007 peringatan Hari Bhayangkara tahun 2007 dari Mabes Polri menurunkan Perwira Tingginya ke Polsek-Polsek untuk bertindak sebagai Inspektur Upacara, tentu tidak sekedar hanya sebagai Inspektur Upacara saja, dengan Para Pati datang ke Polsek-Polsek dimaksudkan lebih memberdayakan *community policing*. Pada dasarnya pelaksanaan *community policing* dilakukan oleh para Polsek sebagai ujung tombak yang ada didaerah-daerah pelosok-pelosok. Ini akan kita laksanakan terus menerus, tidak hanya pada hari Bhayangkara saja, tapi pada momen lainnya kita akan laksanakan. Karena terbukti cukup efektif, bisa mengetahui bagaimana masukan dari masyarakat dan kita lebih cepat mengubah perilaku anggota yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dikehendaki oleh masyarakat. Agar hal tersebut dapat tercapai dengan baik maka diperlukan satu strategi yang baik,

salah satunya dengan memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk mengkampanyekan visi, misi dan paradigma Polri serta tugas-tugas Polri dilapangan. Disisi lain karena adanya kepentingan pers sebagai industri yang *profit oriented* dan terkadang hanya mengakomodasi pihak-pihak tertentu, kebebasan yang didapat sering dimanfaatkan untuk membentuk opini yang bersifat tendensius serta propaganda dan mengabaikan prinsip-prinsip netralitas dan keseimbangan dari suatu pemberitaan, sehingga kebenaran menjadi relatif dan subyektif. Kebebasan Pers ini tidak hanya dimanfaatkan oleh insan Pers, tetapi juga masyarakat yang secara antusias mengekspresikan berbagai aspirasinya yang memang telah sekian lama terbenyung pada era sebelumnya, sehingga media massa dapat mengangkat sekecil apapun yang terjadi dilingkungan kita sehari-hari, dimana pengungkapannya melanggar norma-norma, baik norma susila, etika bahkan norma hukum.

Dengan menyadari hal tersebut diatas, fungsi Pers bagi media massa

yang diharapkan dapat mendidik dan melakukan kontrol sosial, dituntut untuk dapat menyajikan informasi berupa berita-berita dimedia massa secara jujur, obyektif, benar dan akurat. Hal ini dapat terwujud apabila para wartawan yang mencari berita dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Jurnalistik Indonesia, memahami Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pers dalam hal ini bukan hanya sebagai alat mengekspresikan pendapat dan ide tetapi juga dapat berfungsi sebagai ruang publik untuk berinteraksi dan berko-



Kadiv Humas Mabes Polri, IRJEN POL. Drs. H. SISNO ADIWINOTO, MM memberikan plakat kepada nara sumber.

munikasi dalam kehidupan bermasyarakat dan dipercaya sebagai pembentuk opini yang ampuh dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempertahankan integritas nasional. Oleh karena itu terjalinnya dengan baik dan harmonis antara Humas Polri dan media massa merupakan langkah strategis dalam rangka membangun opini publik yang konstruktif bagi Polri dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sudah saatnya Divisi Humas Polri sebagai pengemban fungsi kehumasan dilingkungan Polri memainkan peran yang kreatif dan efektif dalam menjembatani komunikasi antara Polri sebagai lembaga dan masyarakat sebagai obyek yang dilayani dalam bentuk penyediaan informasi dan berita yang lengkap untuk disajikan kepada media massa cetak maupun media elektronik. Langkah ini tentu dapat berfungsi untuk membangun opini publik yang positif terhadap Polri diseluruh wilayah Indonesia. Sebelum meng-

akhiri amanatnya kepada peserta Rakernis Kapolri memberikan beberapa penekanan sebagai berikut:

1. Agar dapat dicegah tayangan-tayangan dimedia massa yang tidak mencitrakan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ingatlah bahwa tayangan kekerasan yang ditampilkan akan menjauhkan Polri dari sosok Polisi Sipil yang profesional, patuh hukum dan menjunjung tinggi HAM.
2. Gunakanlah kata-kata dan ungkapan-ungkapan data dan informasi yang mudah ditangkap dan dicerna secara umum, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dari setiap apa yang disampaikan.
3. Setiap apa yang disampaikan kepada publik harus benar-benar berorientasi pada pembentukan citra Polri yang bermoral, profesional dan modern agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pemelihara keamanan dalam negeri semakin tinggi.

Kadivhumas Polri menyatakan "Missi Humas diemban oleh seluruh anggota Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pengemban fungsi Humas, para Kasatker dan penanggung jawab tugas operasional dilapangan". Disisi lain media massa yang memiliki kebebasan pers sangat menentukan dalam memilih dan mengemas info dan berita tentang

kinerja Polri. Untuk itu Polri dan media massa harus bersinergi yang simbiose mutualistik sehingga paradigma kebebasan pers tetap harus bertanggung jawab dan ikut serta dalam membentuk opini dan citra positif Polri sebagai institusi yang mengemban amanat rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Untuk meningkatkan kemampuan serta membentuk kemitraan dan sinergi yang positif seperti yang tersebut diatas, maka perlu dilaksanakan Rakernis Humas Polri yang diikuti oleh para Kabid Humas serta Karo Bina Mitra Polda dan juga mengikutsertakan wartawan media massa guna terwujudnya kemitraan yang sinergi antara Polri dan wartawan khususnya, untuk menambah wawasan khususnya dibidang *Public Relations*, kebebasan dan kemerdekaan Pers, pengawasan penyiaran, penindakan pelanggaran pers serta sanksi hukumnya. \*\*\*

Disarikan dari amanat Kapolri dan Laporan Kadivhumas Polri pada upacara pembukaan Rakernis Humas Polri Tahun 2007



# 101 Tersangka *Illegal Logging* Ditangkap

**P**erang terhadap pelaku pembalakan liar terus dilakukan jajaran Polda Riau. Selama sebulan (dari 16 Januari sampai 15 Februari 2007) sedikitnya ditangani 71 kasus dengan 101 tersangka.

Keberhasilan ini membuat Mabes Polri merasa perlu menurunkan tim untuk meninjau langsung hasil tangkapan tersebut Kamis (15/2). Tim yang terdiri dari Irwasum Komjen Jusuf Manggabarani, Kabareskrim Komjen Bambang Hendarso Danuri, Deputi Operasi (Deops) Irjen FX Sunarno dan Direktur Tipiter Brigjen Pol Tukarno, melakukan peninjauan kedua lokasi di Kabupaten Pelalawan yakni PT RAPP dan Mapolres Pelalawan. Ikut bersama tim Kapolda Riau Brigjen Pol Sutjiptadi MM, dan Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dephut Ir Awriya Ibrahim. Menggunakan dua helicopter, rombongan melakukan peninjauan pertama ke PT Riau Andalan Pulp. Dilokasi pabrik perusahaan pulp terbesar di Asia Tenggara ini tim melihat langsung ribuan meter kubik kayu yang sudah di police line oleh Polda Riau. Kayu berdiameter 30 cm yang akan dijadikan bahan kertas itu diduga berasal dari hutan alam ditebang secara liar serta tidak memiliki dokumen sah. Kunjungan tim disambut Direktur Utama PT Riau Pulp Thomas Handoko serta sejumlah petinggi PT Riau Pulp. Selanjutnya rombongan menuju Mapolres Pelalawan di Pangkalan Kerinci melihat kayu sitaan yang diamankan di halaman Mapolres. Ribuan meter kubik kayu serta 35 truk ini adalah milik PT Madukoro yang ditangkap jajaran Polres Palalawan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah. Selain meninjau barang bukti, tim juga mendapat penjelasan mengenai penanganan kasus illegal logging dari Kapolres Pelalawan AKBP Drs Berty Dame Kusuma Sinaga.

Sebelum melakukan kunjungan kedua lokasi ini, rombongan diterima Bupati Pelalawan H. Tengku Azmun Jaafar SH serta unsur Muspida Pemkab Pelalawan di kediaman Bupati. Setelah sarapan pagi dan beramah tamah, Bupati menyerahkan cinderamata kepada rombongan



Barang bukti illegal Logging yang berhasil disita Polri.

Mabes Polri. Usai melakukan Sidak dan sebelum bertolak pulang ke Jakarta, Irwasum Polri Komjen Pol Jusuf Manggabarani kepada wartawan menjelaskan, keberhasilan yang dicapai Polda Riau merupakan bukti keseriusan jajaran Polri dalam memerangi aksi illegal logging. Dia berharap, dengan keberhasilan itu hutan Riau bisa diselamatkan serta para pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Didampingi Kapolda Riau Brigjen Pol Sutjiptadi MM, Irwasum menguraikan, hasil yang dicapai dalam operasi Mandiri kewilayahan Polda Riau terhadap pelaku illegal logging selama sebulan (16 Januari sampai 15 Februari 2007), berhasil mengungkap 71 kasus dengan 101 tersangka dan ribuan kubik kayu. Tersangka terdiri dari sopir, penerbit dokumen peredaran kayu dan perizinan serta korporasi, sedangkan saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak 11 orang, antara lain 2 dari Polri, 2 Dinas Kehutanan, 3 orang dari PT PKS, 2 orang karyawan PT Madukoro dan 2 karyawan PT Riau Pulp.

Adapun barang bukti (BB) yang berhasil diamankan antara lain : 15 unit kapal, 1 unit pontoon, 33.702 batang kayu bulat, 1540 batang kayu bulat, 3859 batang kayu bulat, 2523 meter kubik kayu olahan, 10 unit

eskavator, 90 unit truk, 2 unit Chain saw, dokumen perizinan dan dokumen yang berkaitan dengan peredaran kayu, serta ribuan kayu yang saat ini masih berda di sungai dan hutan.

"Para tersangka dijerat pasal 50 ayat (3) huruf e, f, g, h jo pasal 78 ayat 7 UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta pasal 263, 264, 266 jo pasal 55 dan 56 KUHP " papar Irwasum.

Mengenai kasus kayu milik PT Madukoro sebanyak 1239 batang yang ditangkap Polres Pelalawan, Irwasum menegaskan, kayu itu illegal karena diangkut tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Atas perbuatan itu tersangka dijerat pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta pasal 55 KUHP.

Terkait kasus ini Polres Pelalawan sudah memeriksa sejumlah saksi serta menahan 25 sopir, kepala lapangan PT Riau Fiber, dan pencatat LHP PT PKS dan PT Madukoro. Modus operandi kegiatan legal yang dilakukan tersangka yakni mengangkut kayu bulat dari tempat penumpukan kayu (TPK) antara PT Madukoro Kabupaten Pelalawan dengan tujuan PT Asia Forestama Raya di Rumbai Pekanbaru tanpa dilengkapi dokumen yang sah (SKSKB).\*\*\*



# RAKERNIS HUMAS POLRI



Kapolda Jenderal Sutanto, saat membuka Rakernis Humas Polri.

**R**akernis atau Rapat Kerja Teknis merupakan kegiatan yang telah diprogramkan dalam Proja Divhumas Polri tahun 2007, hal ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan peran dan fungsi kehumasan dalam rangka mengantisipasi kemajuan bidang informasi dan komunikasi. Rakernis Humas Polri dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Juli 2007 bertempat di Rupattama Mabes Polri dengan mengusung tema **"Meningkatkan Peran Public Relation dalam rangka memasyarakatkan kinerja Polri Guna Membangun kepercayaan Masyarakat"**

Sekitar 105 peserta Divisi Humas, Kabid Humas Polda, Karo Binamitra Polda, para pengemban fungsi Humas Lemdikti, BNN dan para pengemban fungsi Humas Satker Mabes Polri serta beberapa wartawan dari Jakarta. Kapolda dalam acara pembukaan mengharapkan dan mengarahkan "Meski gaji kecil Polisi tidak akan pernah mogok kerja, karena itu wartawan agar tidak hanya memberitakan yang jelek saja mengenai Polisi, tetapi memberitakan pula berita positif tentang keberhasilan Polri".

Selama ini banyak pemberitaan di media massa tidak seimbang, bahkan

cenderung menyudutkan Polri, akibatnya banyak opini negatif muncul di masyarakat, karena itu Kapolda meminta agar kebebasan pers digunakan untuk hal-hal yang baik dan dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat. Pada kesempatan Rakernis disampaikan beberapa makalah oleh para narasumber, dari Menkominfo, praktisi media cetak dan pengamat Polri serta pemantau media, KPI, Lembaga

Sensor Film dan Dewan Pers Indonesia, melalui ceramah, diskusi panel dan arahan. "Hasil Rakernis diharapkan semua elemen Polri khususnya Kabid Humas dan Karo Binamitra Polda dapat lebih membina hubungan yang harmonis dengan media massa, dan mampu menjembatani Polri dan masyarakat, serta dapat mengemban fungsi Humas secara lebih profesional".

Wakapolda Komjen Pol Drs. Makbul Padmanegara dalam acara penutupan mengharapkan "Hasil Rakernis dapat menjadi motivasi dan upaya peningkatan kinerja Humas dalam menghadapi era globalisasi informasi. Penting bagi Humas sebagai pemberi informasi yang obyektif, benar, tepat dan akurat, sehingga tidak menimbulkan opini negatif di masyarakat".

Wakapolda juga menghimbau kepada seluruh jajaran Kapolisan, agar "Lebih memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan tersangka dan tindakan upaya paksa lainnya secara teknis harus profesional dan proporsional sesuai dengan teknis yang dimiliki Polri".\*\*\*



Para peserta Rakernis Humas Polri.



# Wujudkan Perilaku Anggota yang Dapat Menciptakan Perasaan Tenteram Damai dan Terlindungi

Kondisi geografis daerah Maluku yang sangat strategis, dengan kekayaan sumber daya alamnya merupakan potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku yang dikelola dan ditangani secara baik dan profesional. Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya yang diperuntukkan sepenuhnya bagi pembangunan dan kemajuan di Maluku maka keamanan dan ketertiban merupakan faktor dominan yang utama yang dapat membawa kegiatan pengelolaan tersebut berjalan dengan lancar, penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya juga penting untuk dilakukan secara tegas konsisten dan transparan agar tata pengelolaan yang dilaksanakan dapat tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat, demikian penegasan Kapolri pada acara serah terima jabatan Kapolda Maluku dari pejabat lama Brigjen Pol Drs. Guntur Gatot Setiawan MM, kepada pejabat baru Brigjen Pol Drs. Moch. Guntur Ariadi MSi. bertempat di Rupattama Mabes Polri Jakarta.

Lebih jauh Kapolri mengatakan, Polri sangat memahami bila masyarakat banyak menuntut kepada Polri untuk meningkatkan kinerjanya dalam memelihara Kamtibmas menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Beberapa kejadian di wilayah Maluku pada masa lalu untuk kita perhatikan agar tidak terulang kembali terjadinya konflik horizontal yang banyak memakan korban jiwa, harta benda dan menyengsarakan masyarakat. Konflik telah menguras pikiran, biaya untuk penyelesaiannya. Masih segar dalam ingatan bagaimana konflik ini berawal dari yang semula hanya berupa bentrokan atas sekelompok orang hingga meluas menjadi konflik yang bersifat Sara. Upaya-upaya mencegah terjadinya korban dan menciptakan perdamaian terus dilakukan, mulai dari melakukan darurat sipil, kemudian dirubah menjadi tertib sipil, hingga menyelenggarakan kesepakatan dan upaya-upaya lain untuk rekonsiliasi dan integrasi yang kesemuanya dilakukan guna menciptakan kedamaian, ketertiban di wilayah

Maluku. Pada waktu terakhir ini, situasi dan kondisi di wilayah Maluku secara umum lebih baik dari sebelumnya, walaupun beberapa peristiwa yang mengganggu keamanan dan ketertiban masih terjadi antara lain peledakan bom di Ambon, adanya kegiatan yang mengganggu keutuhan NKRI dan beberapa kejadian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada keinginan dari sekelompok kecil orang yang tidak menginginkan adanya kedamaian ketertiban dan keamanan di wilayah Maluku.



Kapolri Jenderal Pol. Drs. Sutanto memberikan selamat kepada Kapolda Maluku yang baru Brigjen Pol Drs. Moch. Guntur Ariadi MSi. usai Sertijab bertempat di Rupattama Mabes Polri Jakarta.

Mempelajari dinamika kehidupan sosial sejarah terjadinya konflik yang pernah ada di Maluku, tidak bisa menganggap segala kejadian yang muncul ke permukaan sebagai kejadian spontanitas dan berdiri sendiri. Tetapi hendaknya harus kita fahami sebagai satu indikator yang menunjukkan adanya permasalahan yang keberadaannya mendalam dan perlu penyelesaiannya secara holistik dan konfrehensif sehingga upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan benar-benar dapat ditujukan untuk meniadakan permasalahan sampai keakar-akarnya.

Kita menyadari bahwa menemukan format dan mengafilikasinya secara baik, upaya-upaya penyelesaian



tersebut tidaklah mudah. Polri dalam hal ini selain harus profesional, juga dituntut mampu menjalin kerjasama dan menggerakkan berbagai pihak serta seluruh potensi masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat agar permasalahan-permasalahan yang bersumber dari seluruh aspek kehidupan sosial tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas dan apabila muncul menjadi gangguan Kamtibmaspun dapat dideteksi sejak awal atau sifatnya hanya kecil atau mudah untuk ditanggulangi.

Agar Polri mampu berperan sebagaimana Kapolri sampaikan diatas, faktor Sumber Daya Manusia Polri sangat memegang peran yang besar dan titik sentralnya terletak pada mereka yang duduk pada level pimpinan. Kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin Polri yang berada pada fungsi dan level apapun merupakan hal yang sangat menentukan untuk membawa Polri menuju visi, misi tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini semua pihak sangat menaruh harapan kepada pejabat baru Kapolda Maluku Brigjen Pol Drs. Moch. Guntur Ariadi MSi, agar harapan ini tidak sekedar harapan, tetapi harapan yang didasarkan pada keyakinan bahwa Kapolda yang diantik hari ini mampu dan dapat dipercaya untuk mengemban jabatan baru.

Berkaitan dengan jabatan baru yang Jenderal terima ini ada beberapa penekanan untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani.

**Dalam bidang pemeliharaan Kamtibmas;** Kembangkan dengan baik strategi Perpolisian Masyarakat yang dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang bersumber dari aspek sosial, politik, budaya, agama, ekonomi, pertahanan dan keamanan, agar tidak tumbuh menjadi gangguan Kamtibmas, yang menghambat pembangunan daerah Maluku. Bangun kesadaran masyarakat, bahwa Maluku bagian dari NKRI, yang sangat kita cintai.

Selain itu jaga keutuhan masyarakat Maluku, yang terdiri dari berbagai lapisan dan latar belakang kehidupan sosial, agama dan kepercayaan, melalui pemeliharaan harmonisasi hubungan didalam kehidupan warga masyarakat, sehingga kedamaian, ketertiban dan keamanan masyarakat yang telah tercipta disana dapat terus berlangsung dengan baik.

**Dalam penegakan hukum;** Lakukan tindakan penegakan hukum, yang menjamin kepastian dan rasa keadilan masyarakat. Kapolda diharapkan dapat independen dalam menangani setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi. Tunjukkan bahwa Polri selalu berada pada semua golongan masyarakat dan tidak akan pernah berpihak pada golongan manapun juga. Pada posisi ini perintah dari hukum yang berlaku merupakan Panglima tertinggi yang harus Jenderal pegang. Selanjutnya lakukan tindakan tegas setiap tindakan pidana yang merugikan kekayaan Negara dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain tindak pidana korupsi, illegal logging, arms smuggling, kejahatan yang menggunakan dengan senjata api, bahan peledak, dan lain sebagainya.

Saya minta dalam setiap tindakan Kepolisian terutama yang bersifat represif dilakukan dengan tetap mengacu pada hukum

yang berlaku menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai norma agama, serta sosial yang berkembang didalam kehidupan masyarakat Maluku.

**Dalam bidang perlindungan,** pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; Wujudkan perilaku anggota yang dapat menciptakan perasaan tenteram damai dan terlindungi. Lakukan pengawasan yang ketat pada satuan fungsi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, hindarkan pelayanan yang bersifat diskriminasi. Tindakan Kepolisian yang dilakukan harus benar-benar berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perorangan atau Kelompok orang, sehingga citra Polri sebagai alat Negara yang mandiri dan dapat dipecah oleh masyarakat dapat terbentuk.

Berkaitan dengan Satuan Kepolisian; Manfaatkan seefisien mungkin segala sumber daya yang dipertanggung jawabkan kepada Kapolda. Lakukan pengembangan dan pembinaan kekuatan sesuai kewenangan yang dimiliki secara transparan dan akuntabel terutama berkaitan dengan penerimaan anggota Polri. Berikan juga reward dan punishment pada anggota secara seimbang jelas dan tegas. Lakukan pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan operasional Kepolisian pada tempat dan waktu setiap kegiatan yang rentan terhadap terjadinya penyimpangan.

Jangan hanya selalu berbicara dalam tataran kebijakan dan strategis, tetapi hendaknya mau turun kelapangan, untuk mengecek pelaksanaan yang dilakukan oleh anggota, yang kemungkinan bersifat taktis dan teknis. Melalui keterlibatan dan pengamatan langsung dilapangan maka motivasi dan ikatan emosi sebagai pimpinan dengan anggota sebagai pelaksana akan semakin kuat dan segala keputusan yang diambil dapat cepat, tepat, dan dapat memahami kesulitan dan hambatan yang dialami anggota dilapangan.

Sebelum mengahiri amanatnya Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama Brigjen Pol Drs. Guntur Gatot Setiawan MM. atas dedikasi dan pengabdianya dalam memimpin Polda Maluku hingga sampai saat ini situasi Maluku masih kondusif. Pimpinan lama Polda Maluku telah menuntaskan penanganan terhadap kasus terakhir dengan telah mengungkap dan menahan para pelakunya.

Keharmonisan diantara anggota Polri juga telah dapat dibangun dan ditingkatkan dimana hal ini pernah terganggu saat terjadinya konflik diwilayah Maluku. Selain itu juga telah dapat mengungkap kasus-kasus yang berimplikasi merugikan Negara seperti illegal logging, illegal fishing, korupsi dan lain-lain. Walaupun sempat beredar selebaran yang bernuansa profokatif namun daerah Maluku terutama warga kota Ambon dapat melewati liburan Idul Fitri 1427 H dengan aman. Semoga apa yang telah dirintis dan diperbuat dapat diteruskan oleh pejabat baru dengan baik. \*\*\*

*Disarikan dari amanat Kapolri pada acara Sertijab Kapolda Maluku dari Brigjen Pol Drs. Guntur Gatot Setiawan MM. kepada Brigjen Pol Drs. Moch. Guntur Ariadi MSi. bertempat di Rupattama Mabes Polri Jakarta.*





Kapoli Jenderal Pol. Drs. Sutanto memberikan selamat kepada Kapolda NAD yang baru Irjen Pol Drs. Rismawan usai sertijab bertempat di Rupattama Mabes Polri Jakarta.

# Kembangkan dengan Baik Strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas)

**K**ondisi geografis Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sangat strategis dan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah merupakan potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian seiring dengan perjalanan waktu provinsi NAD telah mengalami ujian yang cukup berat seperti munculnya konflik vertikal dan bencana tsunami. Konflik vertikal yang bekepanjangan telah menimbulkan korban baik jiwa maupun harta benda yang tidak sedikit. Kita memahami bahwa konflik ini sangat tidak menguntungkan bagi masa depan negara kita. Oleh karena itu, berlandaskan kesadaran akan rasa cinta kepada NKRI dan menginginkan adanya kedamaian di wilayah Serambi Mekkah ini mendorong seluruh komponen masyarakat, Bangsa dan Negara untuk mencari upaya-upaya penyelesaian konflik ini secara baik, adil, dan saling

menghargai, demikian pembukaan sambutan Kapoli pada acara serah terima jabatan Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dari Komjen Pol Drs. Bachrumsyah Kasman, SH kepada Irjen Pol Drs. Rismawan bertempat di Gedung Rupattama Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Kapoli menegaskan, namun belum tuntasnya penyelesaian konflik vertikal ini masyarakat Aceh masih diuji dengan kejadian bencana alam tsunami yang demikian dahsyat dan telah meluluh lantakkan bumi serambi Mekkah tersebut yang mengakibatkan hancurnya sebagian besar sarana dan prasarana yang ada sehingga berdampak kepada terhentinya roda perekonomian dan pemerintahan daerah untuk sementara waktu. Disamping itu banyaknya korban jiwa sebagai akibat dari bencana alam tsunami tidak dapat dihindarkan. Korban tidak hanya orang dewasa tapi mulai dari anak-anak hingga

para lansia yang jumlahnya kurang lebih mencapai 160.000 orang dan bahkan Polri sendiri saat itu juga kehilangan sedikitnya 1000 personelnya.

Menghadapi situasi kondisi yang memprihatinkan tersebut sebagai sesama bangsa Indonesia yang mempunyai rasa senasib sepenanggungan kita tidak bisa tinggal diam. Berbagai bantuan untuk memulihkan wilayah Aceh ini terus didatangkan baik berupa bantuan tenaga, pikiran, maupun materi. Selain itu berbagai bantuan tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari pihak luar negeri. Atas nama rasa kemanusiaan seluruh pihak bekerja sama saling bahu-membahu menciptakan kembali kehidupan masyarakat Aceh yang dilanda tsunami. Sementara rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam ini berlangsung, upaya penyelesaian konflik vertikal terus dilakukan hingga pada tanggal 15 Agustus 2005 terjadi kesepakatan damai (MoU), antara Pemerintah RI dengan GAM. Kesepakatan ini menjadi harapan semua pihak untuk terciptanya kedamaian di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui pengawasan dari AMM (Aceh Monitoring Mission) butir-butir didalam kesepakatan tersebut tahap demi tahap dilaksanakan mulai dari penghancuran senjata dari kelompok bersenjata, pembubarhan kelompok GAM beserta seluruh unsur pendukungnya, penarikan pasukan non organik TNI-Polri hingga pemantauan, penyelesaian dan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersepakat.

Dari uraian tentang peristiwa masa lalu di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam tersebut diatas kita tentu dapat merasakan betapa beratnya perjuangan seluruh anggota Polri yang bertugas di Nanggroe Aceh Darussalam. Di tengah konflik vertikal yang demikian rumit upaya penyelesaiannya dan dihadapkan dengan bencana alam tsunami yang telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan demikian besar, Polri masih dapat mengemban tugas dengan baik hingga alhamdulillah atas usaha dan kerja keras Polri tersebut yang tentunya dengan didukung semua pihak situasi dan kondisi di wilayah NAD sekarang ini, secara umum semakin hari menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan kita sangat optimis ini akan dapat berlangsung seterusnya. Menyimak terhadap apa yang telah dilakukan oleh seluruh anggota Polri di wilayah Polda NAD selama ini sudah sepatutnya bila pada acara serah terima jabatan ini sebagai pimpinan Polri, menyampaikan ucapan terima kasih dan



penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama Komjen Pol. Drs. Bachrumsyah Kasman, SH atas segala prestasi yang telah diraihinya selama menjabat sebagai Kapolda NAD.

Karakter kepemimpinan Jenderal yang kuat telah berhasil membawa dan mendorong seluruh anggota Polri di NAD melewati masa-masa kritis dan sulit sehingga anggota kita tetap tegar dan tabah dalam menghadapi segala tantangan tugas yang berkembang, prestasi besar yang dapat dicatat dan diakui semua pihak selama Jenderal ditugaskan di NAD, antara lain:

1. Jenderal dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik saat mengemban KEPPRES sebagai Kakekopliham dan penguasa Darurat Sipil
2. Pada paska terjadinya bencana alam tsunami 26 Desember 2004, Jenderal mampu menumbuhkan motivasi seluruh anggota Polri/PNS Polri dan keluarganya yang terkena musibah. Kita tidak akan pernah lupa bagaimana Jenderal sesaat setelah terjadinya bencana alam dengan pakaian dan perlengkapan seadanya, mengumpulkan, menghitung dan mendata serta mengarahkan anggota untuk menghadapi tugas dan membesarkan hati anggota untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Walaupun didukung oleh sumber daya yang terbatas akibat bencana alam tsunami, melalui kepemimpinan Jenderal, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian masih tetap berjalan lancar terutama dalam memberikan bantuan penyelamatan korban luka, mendata korban jiwa, korban hilang, pengamanan dalam pendistribusian bantuan dan lain-lainnya.
3. Dalam upaya penyelesaian konflik vertical, Jenderal juga dapat mengambil peran secara proporsional dan profesional terutama ketika ditugaskan sebagai delegasi Pemerintah Republik Indonesia dalam perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia.
4. Tugas-tugas Polri setelah terjadinya bencana alam tsunami dan kesepakatan di Helsinki dapat Jenderal laksanakan dengan sukses seperti tugas pengamanan/pengawasan terhadap orang asing yang terlibat dalam BRR, AMM, dan kegiatan lainnya, pengamanan kegiatan dalam pemusnahan senjata api dari pihak kelompok bersenjata, pengamanan kegiatan BRR, pemberantasan lahan ganja dan lain-lain.
5. Beberapa tugas lain dalam mendukung berjalannya kehidupan demokrasi disana juga dapat Jenderal laksanakan

dengan baik antara lain turut serta dalam merancang MoU, penanganan gangguan Kamtibmas dalam rangka penyelenggaraan Pilkada di NAD, keberhasilan dalam pengamanan Pilkada langsung di Provinsi NAD dengan tertib dan damai, memberikan sumbangan pikiran dalam pembuatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, menjembatani dalam pembuatan Qanun Aceh, dan lain-lain.

Selain prestasi-prestasi tersebut diatas, tentu masih banyak prestasi lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu selama kurang lebih 33 tahun Jenderal mengabdikan di Polri ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan terhadap segala apa yang Jenderal berikan kepada Polri, masyarakat, Bangsa, dan Negara ini. Tentunya hal tersebut akan terus dikenang dan menjadi catatan sejarah yang tidak terlupakan.

Selanjutnya kepada pejabat baru Irjen Pol Drs. Rismawan, walaupun Aceh bukan merupakan tempat baru bagi Jenderal, namun saya tetap meminta keseriusan dan kewaspadaan Jenderal dalam menangani segala permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian yang sedang berlangsung disana. Beberapa kejadian seperti pelemparan granat di Mako Brimob Polda Aceh, rumah wakil Walikota Lhokseumawe dan beberapa kejadian lainnya merupakan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil orang yang tidak menginginkan wilayah NAD aman, tertib, dan damai.

Menyikapi situasi dan kondisi tersebut, pada kesempatan ini saya ingin menekankan beberapa hal kepada Jenderal untuk dilaksanakan dan dipedomani :

#### **Dalam bidang pemeliharaan Kamtibmas.**

Kembangkan dengan baik strategi Perpolisian Masyarakat (POLMAS), yang dapat mengatasi dan menyelesaikan segala persoalan yang bersumber dari aspek sosial, politik, budaya, agama, ekonomi, pertahanan dan keamanan agar tidak tumbuh menjadi gangguan Kamtibmas yang menghambat pembangunan daerah yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan disana. Bangun kesadaran masyarakat untuk patuh hukum, cinta tanah air, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kuatnya kehidupan yang bernuansa Islam yang didukung dengan aturan tertulis menuntut Jenderal untuk tetap menumbuhkan "sense of crisis" dalam setiap diri anggota dan jangan pernah "under estimate" terhadap setiap permasalahan yang terjadi karena tidak menutup

kemungkinan tindakan anarkhis yang cenderung bemuansa kekerasan atau bahkan tidak manusiawi dapat terjadi.

#### **Dalam penegakan hukum :**

Lakukan tindakan penegakan hukum, yang menjamin kepastian dan rasa keadilan masyarakat, Jenderal diharapkan dapat independen dalam menangani setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi, dengan mengacu pada prinsip-prinsip ideal profesi Kepolisian. Lakukan tindakan tegas terhadap setiap tindak pidana yang merugikan kekayaan Negara dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain tindak pidana korupsi, illegal logging, arms smuggling, kejahatan dengan menggunakan senjata api/bahan peledak illegal dan lain sebagainya. Saya meminta setiap tindakan Kepolisian terutama yang bersifat represif dilakukan dengan tetap mengacu pada hukum yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai dan norma-norma agama serta sosial yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

#### **Dalam bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat :**

Wujudkan perilaku anggota yang dapat menciptakan perasaan tenteram, damai, dan terlindungi. Lakukan pengawasan yang ketat, namun saya yakin dengan segala pengalaman, ketrampilan, dan ilmu pengetahuan serta sifat kepemimpinan yang Jenderal miliki, tugas berat yang menanti, akan dapat dilaksanakan dengan baik. Jagalah kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan, masyarakat, bangsa, dan Negara ini. Kepada Jenderal, selamat menduduki jabatan yang baru. Kita semua mengharapkan keberadaan Jenderal, dapat menciptakan kemajuan bagi keamanan dan kedamaian di NAD.

Sebelum menutup amanatnya Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Bachrumsyah Kasman, dimana selama ini dengan setia mendampingi, mendorong, dan mendukung suami dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kepada pendamping pejabat baru, Ibu Rismawan, berikan terus dorongan dan dukungan kepada suami dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tentunya dengan keberadaan ibu disamping suami dalam melaksanakan tugas yang baru akan semakin memberikan semangat kepada suami untuk bekerja, berkarya, dan mengukir prestasi.\*\*\*

*Disarikan dari Amanat Kapolri pada Acara Serah terima Jabatan Kapolda Nangroe Aceh Darussalam bertempat di Rupattama Mabes Polri Jakarta*



# Mari Berdiri Tegak, Merapatkan Barisan, Menggalang Kekuatan dalam **Memerangi** Penyalahgunaan Narkoba



Ketua BNN Jenderal Polisi Sutanto memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi BNN, BNP, BNK/Kota yang diselenggarakan di Jakarta

Bangsa ini, demikian antara lain penegasan Kapolri Jenderal Sutanto selaku Ketua BNN pada acara Rapat Koordinasi BNN, BNP, BNK/Kota yang diselenggarakan di Jakarta.

Selanjutnya kata Kapolri, sudah sepantasnya mereka **dihukum dengan seberat-beratnya**. Kita tentu dapat melihat, bagaimana Negara tetangga kita, sangat serius dan konsisten menghukum berat, kepada Bandar kejahatan Narkoba. Dikhawatirkan apabila kita lemah dalam penegakan hukum, mereka akan lebih meningkat kegiatannya di wilayah kita, sebagai basis konsumen, transit maupun produsen.

Berkaitan dengan kasus Narkoba, sebagai gambaran singkat

bahwa berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus dan tersangka pelaku tindak kejahatan Narkoba, yang terungkap dan jumlah penyalahguna Narkoba yang terdeteksi, menunjukkan peningkatan yang tajam diseluruh wilayah tanah air. Jumlah kasus Narkoba, meningkat pada lima tahun terakhir dari sebanyak 3.617 pada tahun 2001, menjadi 17.355 pada tahun 2006, atau meningkat rata-rata 34,4% per-tahun atau 20 kasus per hari. Jumlah tersangka kejahatan Narkoba meningkat dari 4.924

orang pada tahun 2001, menjadi 31.635 pada tahun 2005 atau meningkat rata-rata 33,6% per tahun atau 28 orang per hari.

Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, telah berhasil disita Narkoba jenis Narkotika, antara lain; ganja dan derivatnya sebanyak 155,935 ton, 1.974.541 batang dan ditemukan lahan seluas 610 Ha. Heroin sebanyak 102.439 gram, serta Kokain sebanyak 69,4 Kg. Sedangkan Narkoba jenis Psikotropika antara lain; Ekstasi sebanyak 1.236.127 tablet dan shabu sebanyak 1.726.270 gram, daftar G 5.108.132 tablet.

Dalam proses peradilan saat ini, tercatat sebanyak 62 orang yang sebagian besar warga Negara asing, telah dijatuhi hukuman mati, dengan rincian; tiga orang telah dieksekusi, meninggal satu orang, proses pengajuan PK 14 orang, proses Kasasi sembilan orang dan belum ada sikap (grasi dan PK) 26 orang. Sedangkan jumlah WNI yang melakukan kejahatan Narkoba di luar negeri, sejak tahun 2001 - 2007 berjumlah 58 orang.

Sementara itu hasil penelitian BNN kerjasama dengan lembaga penelitian Universitas Indonesia tahun 2004, tentang studi biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan Narkoba menggambarkan bahwa : jumlah penyalahguna sebesar 1,5% dari populasi penduduk Indonesia (3,2 juta orang), dengan kisaran 2,9 sampai 3,6 juta orang. Biaya ekonomi & sosial penyalahgunaan Narkoba diperkirakan sebesar Rp. 23,6 triliun. Penyalahguna IDU'S (*Injecting Drug Users*) sebesar 56% (572.000 orang), dengan kisaran 515.000 - 630.000 orang. Biaya ekonomi terbesar adalah untuk pembelian/konsumsi Narkoba, yaitu sebesar Rp. 11,3 triliun. Angka kematian pecandu pada kisaran 15.000 orang meninggal pertahun, atau tiap hari 41 orang meninggal karena Narkoba.

Berbagai aktifitas yang telah kita lakukan, pada tahun 2006, telah memberikan dorongan dan semangat bagi kita, untuk selalu optimis memerangi Narkoba. Sebagai contoh perjuangan kita dalam menyusun proposal program *alternative development* tanaman ganja di Nanggroe Aceh Darussalam, telah mendapat respon positif dari UNODC (*United Nations Office on Drugs dan*



Crime) dan DPR-RI (melalui alokasi anggaran untuk program dimaksud). Demikian juga komitmen para pejabat dan masyarakat setempat, sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan ini. Selain itu pembangunan panti terapi dan rehabilitasi di Lido, yang merupakan tempat perawatan korban penyalahgunaan Narkoba terbesar di ASEAN, direncanakan akan diresmikan pertengahan tahun 2007, bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI 2007), Diharapkan kedepan tempat-tempat tersebut dapat berfungsi sebagai **"pusat rujukan nasional, sekaligus sebagai laboratorium terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, serta sebagai lokasi pelatihan/pendidikan tenaga profesional, penanganan korban penyalahgunaan Narkoba"**.

Demikian juga MoU dengan berbagai BUMN seperti PLN, Pertamina dan juga dengan pengusaha perfilman "Twenty

One" serta pemberdayaan seniman yang membentuk forum **"Seniman Indonesia Anti Narkoba"** (SIAN), mudah-mudahan dapat meningkatkan peran serta berbagai institusi dan masyarakat memerangi Narkoba. Berbagai program tersebut diatas, sangat bernilai strategis. Mudah-mudahan hal ini dapat berkembang didaerah. Berbagai inovasi dan kreatifitas dapat dilakukan asalkan tidak mengikat, memang kita harus terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dalam memerangi Narkoba, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

Dilain pihak, masalah-masalah kelembagaan yang saat ini masih dirasakan oleh BNP BNK/Kota, sebagai salah satu kendala dalam mengaplikasikan program P4GN, mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat segera teratasi, dengan terbitnya Peraturan Presiden yang baru menggantikan Keppres 17/2002 tentang

BNN. Memang perlu waktu dan proses yang kadang melelahkan, akan tetapi kita harus yakin dan optimis seiring tekad dan kepedulian kita, dalam memerangi permasalahan Narkoba.

Sebelum mengakhiri sambutannya Ketua BNN Jenderal Polisi Sutanto mengatakan bahwa Rakor BNP/Kota kali ini dianggap sangat penting dan bernilai strategis. Hal ini dilandasi oleh kepentingan dan keinginan bersama untuk menyatukan komitmen, dalam rangka menyelamatkan Bangsa ini dari kehancuran, akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, diucapkan terima kasih pula kepada segenap peserta Rakor yang telah berkenan hadir serta memberi dorongan bagi terselenggaranya kegiatan ini. Kebanggaan bagi kita semua atas antusias dan kepedulian para undangan untuk hadir di acara ini, hal ini menunjukkan adanya kebersamaan kita untuk berdiri tegak, merapatkan barisan, menggalang kekuatan dalam rangka memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

\*\*\*\*

*Disarikan dari amanat Ketua BNN Jenderal Polisi Sutanto pada acara Rapat Koordinasi BNN, BNP, BNK/Kota yang diselenggarakan di Jakarta*



Ketua BNN Jenderal Polisi Sutanto memberikan ucapan selamat kepada Made Mangku Pastika usai membuka Rapat Koordinasi BNN, BNP, BNK/Kota 2007 yang diselenggarakan di Jakarta



# SUDAH SEPANTASNYA PARA PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DIHUKUM SEBERAT-BERATNYA

Permasalahan Narkoba yang sudah menjadi sebuah fenomena global, harus diperangi secara bersama dan dibangun melalui kerjasama yang efektif dan efisien, saling menghormati kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masing-masing Negara. Saya selaku Kepala Negara sangat memahami, bahwa semua negara memiliki peraturan perundang-undangan yang sangat ketat dan diaplikasikan secara ketat pula, dimana diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan ini, demikian antara lain penegasan Presiden RI. pada acara peresmian tempat/panti terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba "Pamardisiwi" dalam acara peringatan "Hari Anti Narkoba Intenasional tahun 2007".

Selanjutnya Presiden mengatakan, Kita juga sangat menyadari bahwa dalam berbagai kasus kejahatan apapun, dengan jenis hukuman apapun seringkali tidak menimbulkan efek jera. Para pelaku kejahatan sering mengulang kejahatannya, berulang-ulang keluar masuk penjara dan tidak jera atas hukuman yang diterimanya. Dalam kasus kejahatan Narkoba, hal ini sering terjadi, oleh karena sudah sepantasnyalah bagi para pelaku kejahatan Narkoba yang terlibat sebagai pengedar, dan produsen yang terorganisir dalam melakukan kejahatannya dihukum seberat-beratnya sampai batas maksimal sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan tidak membedakan kewarganegaraan para pelaku kejahatan ini. Pemindaan yang berat diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah dapat menciptakan rasa kesadaran masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Sangat dipahami, bahwa bagaimanapun dinamika hukum yang berlaku di suatu Negara adalah untuk melindungi dan memenuhi rasa keadilan masyarakatnya, bukan serta merta untuk memenuhi tuntutan global yang kadang kurang sesuai dengan cita-cita hukum di suatu Negara. Sebagaimana halnya bangsa kita memiliki filosofis, kultur/budaya dan sistem nilai tersendiri, kita harus ingat bahwa, yang mengetahui apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan atas hak dan kewajiban masyarakat dari suatu Negara adalah Negara itu sendiri. Lihatlah Negara-negara tetangga yang memiliki aturan ketat dan diaplikasikan secara ketat pula dibidang kejahatan Narkoba, jangan sampai menyuburkan wilayah kita menjadi tempat transaksi peredaran gelap Narkoba dikarenakan aplikasi penegakan hukum yang lemah.

Kejahatan Narkoba adalah merupakan kejahatan yang sangat serius dan sudah sepantasnya dihukum seberat-beratnya. Apapun alasannya, para pelaku kejahatan Narkoba sudah sangat mengetahui dan paham akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkoba. Orang bisa menjadi perampok, pembunuh, pemerkosa, meninggal dunia, rusak moralnya, akibat penyalahgunaan Narkoba ini.

Dengan demikian, mereka telah melakukan perbuatan

perencanaan kejahatan yang berakibat menimbulkan kematian seseorang walaupun tidak secara langsung dirasakan, tapi pasti cepat atau lambat akibat itu akan terjadi. Lebih mengerikan lagi apabila perdagangan Narkoba dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris, sehingga ada hubungan perdagangan gelap Narkoba dengan kelompok teroris yang dapat kita sebut sebagai Narkotika Terorisme (*narco terrorism*) dan kaitannya dalam kejahatan ekonomi kita sebut sebagai Narkotika Ekonomi (*narco economic*), antara lain melalui kejahatan Pencucian Uang (*money laundering*). Oleh karena itu, komitmen dan keseriusan kita dalam menangan



Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Kapri Jenderal Sutanto dan Menkopohukam Widodo AS memeriksa heroin yang berhasil disita oleh Polri.

permasalahan Narkoba harus benar-benar dipahami oleh segenap tataran personal, institusional dan sosial dari setiap komponen bangsa ini dengan sepenuh hati.

Kondisi geografis wilayah kita sedemikian luas dengan berbagai pintu masuk melalui pelabuhan udara dan juga pelabuhan laut, yang memiliki akses keluar masuknya barang dan orang dari dan ke wilayah Indonesia, sangat memungkinkan para pelaku kejahatan Narkoba leluasa beraktivitas, sebagai akibat kekurangan kita dalam bidang teknologi dan sarana prasarana pengawasan.

Saya berharap, kekurangan kita dibidang teknologi, sarana prasarana di bidang pengawasan jangan menjadikan alasan kita untuk tidak berbuat, kita harus yakin, bahwa tugas memutus jaringan peredaran gelap Narkoba sebagai mata rantai merebaknya kasus jaringan kejahatan Narkoba internasional dapat dilakukan melalui kerjasama yang efektif.

Tidak ada satupun Negara di dunia ini yang mampu menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba murni berdiri di atas kaki sendiri. Perang terhadap Narkoba merupakan trend global. Kejahatan ini memiliki sumber financial, institusi, Sumber Daya Manusia dan teknologi demikian mengesankan, sehingga mereka mampu bergerak dengan leluasa, bahkan kadang tanpa terdeteksi dari satu negara ke negara lain,



dari satu wilayah ke wilayah lain. Oleh karena itu, mustahil menggulung kejahatan ini tanpa kerjasama, teknologi, financial maupun Sumber Daya Manusia yang handal.

Dalam rangka perang total melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sudah saatnya perspektif perencanaan pembangunan daerah, memasukkan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai salah satu program daerah, dimana dalam program tersebut termasuk program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, pemukiman, tempat-tempat hiburan.

Oleh karena itu para pejabat pemerintahan utamanya para kepala daerah untuk menyikapi permasalahan Narkoba ini lebih intensif mengingat dampak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba sangat merugikan bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat dan bangsa. Saya yakin pada suatu saat, bisa saja dalam mengukur akuntabilitas kinerja seorang kepala daerah dapat dilihat bagaimana komitmen mereka dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayahnya.

Dasar pemikiran ini justru muncul dari pemikiran sebagian masyarakat kita yang antara lain menghendaki agar dilakukan tes urine bagi para calon kepala daerah, anggota legislatif, lingkungan kampus, dan diberbagai lingkungan lainnya, sebelum mereka menempati jabatan atau memasuki wilayah yang harus bebas Narkoba. Inilah perang total yang harus dilakukan oleh kita semua. Ide yang berkembang dimasyarakat ini jangan sampai dianggap menjadi mode yang bersifat sesaat akan tetapi harus ada pemikiran lebih lanjut.

Saat ini kenyataan menunjukkan, bahwa melonjaknya tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagian besar disumbangkan oleh kasus-kasus yang berkaitan dengan Narkoba, baik dalam kategori pengguna, pengedar maupun produsen. Menurut data yang ada untuk tahun 2007, jumlah Narapidana di Lapas sekitar 118.453 (seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga), khusus yang terlibat kasus Narkoba sebanyak 34.166 (tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam) atau sekitar 29 %. Dari 29 % ini, yang terlibat sebagai pengguna 74 %, pengedar 24 % dan produsen 2%. Jumlah narapidana kasus Narkoba tersebut adalah data tingkat nasional, akan tetapi apabila kita lihat pada lapas di kota-kota besar jumlah Narapidana kasus Narkoba sudah mencapai lebih dari 50%.



Kapoli Jenderal Sutanto menyaksikan para tersangka pembuat dan pengedar narkoba yang diringkus jajarannya.

Sementara itu, perlu diketahui bahwa khusus bagi narapidana pengguna Narkoba sesungguhnya memerlukan bantuan program terapi, bukan hanya penahanan. Dengan terbatasnya fasilitas terapi dan rehabilitasi di lapas, maka proses perawatan para korban ini tidak tertangani. Oleh karena itu, sudah saatnya melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki fungsi mengkoordinasikan berbagai instansi dalam menanggulangi permasalahan Narkoba, perlu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Yaitu agar para penyalahguna/korban Narkoba sudah dapat tertangani semenjak dini untuk mendapatkan perawatan sebagaimana orang menderita suatu penyakit, artinya lebih mengedepankan aspek pelayanan kesehatan korban. Keluhan masyarakat tentang kekhawatirannya bahwa apabila seseorang menjadi korban penyalahguna Narkoba dipenjara, kemudian kurang mendapatkan perhatian terhadap proses perawatannya sebagai akibat kendala teknis di lapas, bukannya mereka menjadi pulih akan tetapi justru akan meningkatkan pengetahuan negatif mereka tentang Narkoba misalnya menjadi pengedar, sungguh memprihatinkan. Untuk itu, khusus bagi para penyalahguna/korban Narkoba perlu mendapatkan perhatian dalam aturan dan proses penerapan hukumnya.

Sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional, saat ini telah dibangun sarana prasarana tempat terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Saya berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, yakni mampu mengakomodir kepentingan masyarakat tanpa membebani masyarakat itu sendiri dalam rangka proses terapi dan rehabilitasi. Berkaitan dengan itu saya menyerukan khususnya kepada para pecandu Narkoba segeralah berhenti, sekali lagi berhenti untuk tidak mengkonsumsi Narkoba. Tidak ada satupun seseorang yang dapat meraih sukses dalam hidup ini apabila dalam kehidupannya dikendalikan oleh Narkoba, jadilah pemenang dalam hidup ini tanpa Narkoba. Jangan berbuat kelalaian yang disengaja, karena bagaimanapun kalau kita menjadi pecandu Narkoba, maka dalam hidup ini kita telah kehilangan segalanya dengan sia-sia.

Selain beberapa hal penting yang disampaikan di atas, Kepala Negara mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi terhadap keseriusan aparat di lapangan yang selama ini telah mampu memutus jaringan, membongkar perdagangan gelap dan pabrik gelap Narkoba, memberantas ganja di Nanggroe Aceh Darussalam, dengan tidak pernah kenal lelah. Hal tersebut sungguh suatu prestasi yang sangat membanggakan dan merupakan suatu bukti bahwa Negara kita serius menagnai kejahatan Narkoba.

Sebelum mengakhiri sambutannya Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa tingkat kepedulian masyarakat, dalam hal ini mass media, lembaga swadaya masyarakat/pranata sosial dan komponen masyarakat lainnya, semakin tinggi dalam upaya-upaya penanggulangan permasalahan Narkoba.

Pada kesempatan yang sama selaku Presiden RI mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan khususnya di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. **"Teruskan perjuangan saudara-saudara dalam meningkatkan peran serta dalam menanggulangi permasalahan narkoba"** ujar Presiden.\*\*\*

*Disarikan dari Amanat Presiden RI. pada Acara Peringatan Anti Narkoba Internasional Tahun 2007 bertempat di Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba Lido Jabar*



# MENYIBAK PENANGANAN

Dalam bulan-bulan terakhir ini, kita kembali tersentak dengan temuan pihak Polda Riau akan ribuan batang / log kayu di daerah Riau - Sumatera. Tidak tanggung-tanggung; sepanjang dua kilometer berjejer kayu-kayu tersebut di sepanjang pinggir sungai tanpa keterangan kelengkapan surat izin asal usul yang sah (bisa dibayangkan berapa jumlahnya dan nilainya). Otomatis pihak Kepolisian, bertindak cepat dengan "mengamankan" TKP.

Sampai dengan bulan September ini menurut catatan Bareskrim Polri tidak kurang dari 135 kasus illegal logging telah terjadi di wilayah hukum KALTIM, KALBAR, KALTENG dan JAMBI dengan jumlah tersangka 170 orang. Dari kasus tersebut, telah diselesaikan 61 kasus dan sisanya 61 kasus masih dalam penyelidikan dan penyidikan.

Dalam perkara tersebut, jelas telah melanggar Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, dan pada akhirnya menyerat si pelaku ke wilayah hukum pidana dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Diantara pasal-pasal tentang UU Kehutanan yang dilanggar adalah : *Pertama* : Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. *Kedua* : Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH). *Ketiga* : Membawa alat-laot berat dan atau alat-laot lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang. *Keempat* : Menerima, membeli, atau menjual, menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Di dalam **KUH Pidana**, adalah hal; yang menyangkut : "*menyuruh, memasukkan keterangan palsu kedalam surat pembuktian resmi (akte)....dst, sehingga mendatangkan kerugian*". Dari segi UU

Tindak Pidana Korupsi adalah : "*barang siapa pegawai negeri menerima hadiah atau perjanjian....dst supaya menjalankan sesuatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya*".

Semakin lama Modus Operandi yang digunakan para tersangka semakin licik saja, misalnya : jual beli surat SKSHH dari oknum Dinas Kehutanan untuk melengkapi dokumen kayu illegal, Akte Notaris tentang kuasa mengurus dokumen sewa menyewa alat dari pembeli kepada salah satu karyawan, Akte tentang pengiriman hasil jual beli kayu dari salah satu karyawan kepada pemilik sawmill. Dan yang lebih hebat lagi adalah kiat dalam prosedur pengurusan SKSHH (palsu) sebagai berikut : para pemilik sawmill pada umumnya mendapat bahan kayu bulat dari tangan masyarakat (secara illegal), dan untuk menutupinya maka pemilik sawmill mencari dokumen dari pemegang izin yang sah. Padahal perusahaan tersebut sudah mati izinnya, tapi dengan menghubungi petugas kehutanan didapatkan izin yang diperlukan tersebut. (melalui orang yang diberi kuasa untuk dapat mengurus dokumen SKSHH). Dan dalam mengurus SKSHH ini seluruh syarat administrasi tetap dipenuhi, misal dengan membayar DR dan PSDH. Dan hal tidak tanggung-tanggung lagi adalah SKSHH (palsu) tersebut hanya digunakan apabila ada pengecekan dari petugas, dan apabila tidak ada, maka SKSHB (palsu) tersebut akan digunakan untuk melengkapi kayu illegal berikutnya. Luar biasa bukan? Karena proses ini akan terus menerus berlangsung sampai ada petugas Kepolisian yang berhasil mengungkap proses kebusukan tersebut.

Kabareskrim Polri - Komisararis Jenderal Polisi Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM, menegaskan : bahwa dalam penindakan illegal logging, Polri tidak merambah diluar Tupoksi, namun akan menindak setiap pelanggar tindak pidana tanpa pandang bulu.





# KASUS ILLEGAL LOGGING



Barang bukti illegal logging yang berhasil diamankan.

Menyimak kasus "pembalakan liar" di propinsi Riau yang sampai saat ini masih dalam penanganan, dan tetap menjadi sorotan masyarakat, berlarut-larutnya penanganan kasus tersebut memang sudah terlihat dari awalnya. Sewaktu diamankan oleh pihak Kepolisian, bahwa pihak Dinas Kehutanan setempat tidak dapat menerimanya, dengan alasan sudah sesuai dengan prosedur/peraturan. Sampai-sampai menteri Kehutanan turun tangan dalam masalah ini, termasuk Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perindustrian dan sederet pejabat tinggi lainnya.

Tapi menurut pihak Kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang no.41 tentang Kehutanan dan Inpres tahun 2005 - bahwa hal itu tetap melanggar hukum yang berlaku.

Perbedaan penafsiran juga ternyata telah sampai ke tingkat legislatif, yaitu antara Komisi III DPR-RI yang berbeda pendapat dengan Komisi IV DPR RI.

"Perbedaan Penafsiran terhadap aturan yang ada" dalam memandang masalah ini terus berkelanjutan, dan lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Tim Khusus penanganan pembalakan liar di Riau, yang mana tim tersebut diketuai langsung oleh Menkopolkam Widodo .AS.

Kekhawatiran pihak industri adalah, bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kebutuhan pokok / bahan dasar bagi industri bubur kertas di Riau (ada dua industri raksasa disana, yakni ; Indah Kiat Pulp and Paper dan Riau Andalan Pulp and Paper). Bahwa kayu-kayu yang disita tersebut oleh Polda Riau merupakan stok pabrik untuk akhir bulan Oktober akan terganggu, bahkan tidak mustahil pabrik terancam akan tutup yang pada akhirnya akan menelantarkan belasan ribu karyawan (dan berbuntut kepada ratusan ribu anggota keluarganya).

Tetapi kalau kita menyimak lebih dalam lagi, persoalannya tidak akan sesederhana itu. Seperti yang diungkapkan Kadiv

Humas Polri - Irfan Polisi Drs.Sisno Adiwino.MM, dalam laporannya kepada Kapolri. Ada dua hal yang patut menjadi perhatian dan pertimbangan kita dalam menyikapi kasus "pembalakan liar" di Riau yang sampai saat ini belum juga menemukan jalan keluarnya. Pertama, adalah kapasitas kebutuhan industri kayu di Riau sudah tidak mencukupi lagi dari segi kemampuan supply bahan bakunya. Secara matematis kebutuhan suatu pabrik raksasa tersebut akan bahan baku telah mencapai 18 juta ton pertahun ! Dan kondisi hutan kita disana sudah tidak mampu, ditambah lagi dengan tanaman HTI (Hutan Tanaman Industri) yang mereka punya tidak siap. Padahal, seharusnya sebuah pabrik dapat berjalan/memulai produksi bila mereka menanam terlebih dahulu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya ; mendirikan pabrik dan memabat hutan untuk bahan baku, baru kemudian menanam, Akhirnya terjadi ketimpangan yang sangat serius antara supply dan demand bahan baku pabrik.

Karena kehabisan hutan yang boleh ditebang, akhirnya mengancam ke daerah Hutan Lindung ( dan sudah terjadi secara illegal ! Karena hutan yang ditaman belum membuah hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, keputusan dan peraturan-peraturan bahwa hutan tidak boleh ditebang, ternyata bisa ditebang (seperti di kawasan hutan lindung gambut, telah sampai di kedalaman kawasan sampai sejauh 3 meter dampai 12 meter, masuk ke kawasan hutan lindung dan ditebang habis). Padahal sudah jelas menurut ketentuan, kawasan seperti itu ada batas-batasnya.

Dukungan politis juga akhirnya datang dari Komisi III DPR, setelah para anggota Dewan turun langsung ke kawasan yang dirambah dan sudah rusak, di Riau. Kejahatan pembalakan liar / illegal logging, lebih parah dari korupsi. Karena dampaknya luas sekali, mulai dari dampak ekonomi (penipuan ttg surat keterangan ukuran kayu log, menggunakan dokumen yang harganya lebih murah, sehingga merugikan Negara milyaran rupiah). Sedangkan dampak ekologi/lingkungan (tanah longsor, banjir, kekayaan hayati (punahnya tanaman langka dan satwa langka) dan yang sering terjadi, kebakaran hutan di Riau adalah sebagai akibat pembuatan kanal-kanal hutan gambut, airnya masuk kesitu yang mengakibatkan kebakaran hutan. Sedangkan pemulihan sebuah hutan, akan memakan waktu yang lama (sampai 300 tahun) dan dengan biaya yang tidak murah

Untuk itu, bahwa Polri akan terus melakukakn kerja keras melaksanakan tugasnya dengan payung hukum yang jelas. Memang perlu pembenahan - pembenahan dari kalangan pimpinan lembaga-lembaga terkait, untuk penanganan kasus seperti diatas, agar tidak muncul lagi dimasa-masa mendatang. Dan akhirnya kita semua tanpa terkecuali, harus punya komitmen demi penyelamatan Negara Indonesia yang kita cintai ini dari mala petaka yang leih besar.\*\*\*





## “Diringahayu Polewan”

1 September 2007, lima puluh sembilan tahun sudah Polisi Wanita (Polwan), Usia yang bukan lagi muda dalam hal ini pengalaman menjadi sebuah modal utama dalam kematangan bertindak. Pengabdian Polwan pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah Polri yang turut mengalami pasang surutnya perkembangan organisasi Polri.

Sesuai dengan Tugas dan Peran Polri baik sebagai pemelihara kamtibmas maupun sebagai penegak hukum, seyogyanya patut dijiwai dan diwujudkan oleh insan-insan Polisi Wanita (Polwan) dalam tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polwan dengan tujuan agar Polwan dapat menunjukkan eksistensinya dan berkiprah di segala bidang tugas Kepolisian, serta tanpa terhalang adanya perbedaan gender dengan personel Polri dari kaum laki-laki, sehingga keberadaannya diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat, guna menciptakan rasa







aman, ketertiban dan keteraturan di lingkungan hidupnya masing-masing.

Keberhasilan dalam melaksanakan tugas akan memberikan kepercayaan kepada pimpinan dan masyarakat kita bahwa Polwan juga mampu menduduki suatu jabatan baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional. Keberadaan Polwan saat ini diharapkan tidak lagi sebagai petugas berkaitan dengan pengamanan dan penanganan wanita serta anak, namun diharapkan ke depan peran dan tugas Polwan lebih luas, khususnya dapat bermitra antar unsur, lintas sektoral serta potensi yang ada dalam diri personel Polwan dengan tetap mengutamakan tindakan pelayanan dan pencegahan/ preventif khususnya terhadap kriminal bersenjata.

Dengan tema ulang tahun Polwan yang ke 59 "**Polwan Mitra Masyarakat**" mengandung makna suatu komitmen yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan penuh ketulusan oleh segenap insan Polwan guna memberdayakan masyarakat lingkungannya sebagai subyek bukan lagi sebagai objek untuk bermitra dalam upaya pencegahan kejahatan dalam rangka menciptakan suasana TATA TENTRAM KERTA RAHARJA.

Aktualisasi tema HUT Polwan tersebut tentunya memuat misi dalam rangka pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang merupakan strategi Polri sebagai upaya pembina Kamtibmas yang tengah dikembangkan di lingkungan masyarakat/kawasan tertentu.

Peran serta Polwan sebagai petugas Polmas di beberapa wilayah yang sudah memiliki Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) ternyata mampu memfasilitasikan warga/masyarakat lingkungan melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam mengidentifikasi masalah kerawanan sosial dan sekaligus mencari solusinya. Suasana kebersamaan ini mendapat respon positif warga dan rasa simpatik terhadap para petugas Polmas dari unsur Polwan yang berada di wilayah pemukiman warga/ lingkungan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata Polwan mampu melaksanakan tugas-tugas di lini terdepan yang selama ini didominasi oleh personel Polri dari kaum lelaki.

Semoga dengan bertambahnya usia, Polwan semakin mampu dan berpengalaman dalam tugas dan perannya melalui tindakan Polisional yang professional, proposional, modern, dan bermoral dalam rangka pengabdianya kepada Bangsa dan Negara.\*\*\*



Pembicaraan tentang tenaga kerja luar negeri yang juga Warga Negara Indonesia (WNI) seakan tidak habis-habisnya, mulai dari tuduhan miring terhadap mereka sebagai pembantu rumah tangga yang "telah mempermalukan atau menjatuhkan martabat bangsa". Atau lebih demonstratif lagi adalah dengan meminjam gaya bahasa politisi, ekonom dan Pers yang menyebut mereka sebagai "Pahlawan Devisa" karena memang mereka sebagai penyumbang devisa Negara nomor 2 setelah Migas, (tahun 2006 dari jasa TKI migrant berupa remisitasi mencapai 6,5 miliar dollar AS atau lebih dari Rp.58 Triliun - luar biasa!!! (data TKI WATCH News - Juni 2007).

#### SASARAN EMPUK : TKI dan PELAJAR

Sebagai mata rantai akibat dari akumulasi permasalahan TKI, khususnya Di negara jiran Malaysia terdapat dua hal yang menonjol yang berkaitan dengan "eksploitasi WNI" yaitu tentang permasalahan TKI dan modus operandi Prakerin (praktek kerja industri /on the job training Pelajar/ Mahasiswa).

Kasus eksploitasi yang terjadi selama ini tidak hanya menimpa para TKI ilegal seperti yang masuk tanpa dokumen dan di selundupkan oleh oknum di Indonesia dan Malaysia serta yang menggunakan visa turis untuk bekerja, akan tetapi hal tersebut juga terjadi kepada para TKI yang di kirim secara resmi melalui PJTKI.. Dan hal ini tetap memerlukan penanganan yang serius, karena tidak saja menyangkut HAM akan tetapi menyangkut martabat bangsa.

Modus yang umumnya dipergunakan dalam eksploitasi terhadap TKI antara lain pemalsuan dokumen (dengan merekayasa identitas seperti nama, asal dan usia), memberikan janji-janji palsu (kondisi tempat dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang di janjikan semula), dan eksploitasi (gaji tidak dibayarkan, jam kerja yang tidak terbatas, tempat tinggal yang tidak layak dan diperlakukan secara tidak manusiawi).

Selain itu, modus lain yang di pergunakan adalah recycling atau daur ulang dengan memasukan kembali TKI ilegal ke Malaysia menggunakan identitas baru; praktik perbudakan (keterikatan akibat hutang/*debt bondage*) yang membebankan biaya pembekalan kepada TKI dan sulit di lunasi.

Berdasarkan data yang ada pada KBRI, sebagian besar korban yang ditampung di KBRI Kuala Lumpur adalah para TKW yang dikirim melalui PJTKI resmi. Pada umumnya masalah yang timbul akibat proses rekrutmen, baik mulai dari tahap pra-



Beberapa tenaga kerja wanita asal Indonesia yang mendapat masalah di Malaysia.

## EKSPLOITASI WNI DI MALAYSIA

penempatan (rekrutmen yang tidak selektif, kurangnya pembekalan keterampilan dan kurangnya informasi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban), hingga pasca-penempatan.

Masalah umur yang dipalsukan dalam dokumen juga menjadi hal yang rawan (tidak sesuai ketentuan, jauh di bawah 21 tahun), serta banyak diantara mereka yang tidak memiliki permit sebagaimana mestinya.

Maraknya berbagai kasus di atas juga ternyata dipicu oleh pemerintah Malaysia sendiri, yang memberlakukan perekrutan langsung (*direct recruitment*) dan Visa panggilan individu (*individual calling visa*).

Kasus eksploitasi juga terjadi terhadap pelajar/mahasiswa Indonesia yang berkedok penawaran *program on the job training/Prakerin* bagi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi kejuruan yang memerlukan kerjasama pengiriman siswa di luar negeri (umumnya bidang pendidikan industri pariwisata).

Program Prakerin telah menjadi bagian dari kurikulum sekolah kejuruan dan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di bidang pariwisata dan perhotelan. Program kejuruan tersebut sebagai salah satu syarat yang ditetapkan oleh Depdiknas bagi sekolah kejuruan yang ingin mendapatkan status "internasional", maka Prakerin ke luar negeri makin banyak di lakukan. Namun masalah

Prakerin tersebut telah di dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi dan tidak di lakukan melalui prosedur yang seharusnya, sehingga mengorbankan tujuan utama dan memunculkan kasus seperti tersebut di atas.

Walaupun dalam ketentuan hukum Malaysia mempekerjakan illegal adalah suatu pelanggaran, namun employer yang mempekerjakan illegal tidak ditindak sebagaimana mestinya, meskipun KBRI telah melaporkan ke pemerintah Malaysia. Bahkan banyak user di Malaysia, termasuk hotel-hotel bintang lima dan restoran-restoran besar, mempekerjakan orang-orang Indonesia dengan memanfaatkan program Prakerin secara illegal, hal ini karena mereka mendapatkan keuntungan dari pengguna tenaga kerja yang sangat murah tersebut. Untuk keberadaan pelajar/mahasiswa yang sedang Prakerin terus di lakukan pengecekan dan pendataan.

Sistem hukum di Malaysia berjalan sangat lambat dan berkepanjangan. Terbatasnya jumlah hakim menjadikan perkara hukum sulit untuk dapat diselesaikan dengan segera. Selain itu masuk terdapat kecenderungan untuk memihak warganya sendiri tanpa memandang salah atau benar. Dalam kata lain terjadi diskriminasi hukum terhadap TKI sebagai korban dan pelaku yang merupakan warga Malaysia, dimana proses



hukum lebih "memihak" warganya sendiri.

### Upaya Perlindungan

Harus diakui bahwa akar persoalan TKI ternyata lebih banyak berasal dari dalam negeri, mulai dari perekrutan para calon TKI, pelatihan kepada mereka, pemberangkatan yang tidak mengikuti aturan, serta penempatannya di Negara penerima yang serba tertutup.

Namun KBRI telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para TKI. Diantaranya penyelesaian gaji yang tidak di bayar (jika tidak dilakssnakan, maka bersama aparat keamanan Malaysia, dilakukan penggrebekan), langkah-langkah hukum untuk kasus kekerasan dan pelecehan seksual, serta kompensasi-kompensasi lainnya. Perlindungan juga dilakukan bagi TKI yang tidak tertampung di KBRI, misalnya menyangkut hak-haknya, dan menangani untuk menghindari penangkapan karena permitnya palsu sebagai korban penipuan.

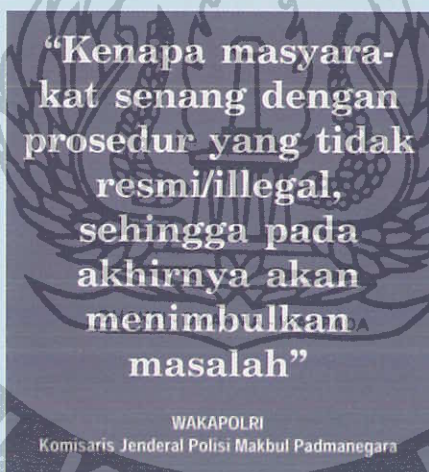
Disamping itu juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan masalah; antara lain membentuk satuan tugas pelayanan dan perlindungan WNI, kegiatan *outreach* di kantung-kantung TKI di berbagai daerah di Indonesia, kegiatan penyuluhan di daerah-daerah konsentrasi TKI di Malaysia, peluncuran *awareness campaign*, dan pelayanan pengaduan melalui SMS. Sedangkan untuk keberadaan pelajar/mahasiswa yang sedang Prakerin, terus di lakukan pengecekan dan pendataan.

Keterbatasan tenaga penyelia untuk urusan TKI di berbagai Konsulat bukanlah alasan klasik, karena sebagai perwakilan Negara setiap kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, baik di tingkat Kedutaan besar, Konsulat jenderal, maupun konsulat, mempunyai tugas utama yang tidak boleh dilupakan, yaitu melindungi warga Indoensia yang ada di wilayah tugasnya. Walaupun perlu dicatat bahwa , dari sekian KBRI di seantero dunia, hanya terdapat enam tempat yang memiliki atase ketenagakerjaan yaitu; KBRI Abu Dhabi, KBRI kuala Lumpur, KBRI Kuwait, KBRI Riyadh, KJRI Hongkong, dan KJRI Jeddah. Padahal ada sejumlah Negara tujuan yang memiliki TKI dalam jumlah besar tetapi di Negara itu tidak ada atase ketenagakerjaan, misalnya di Seoul (Korea Selatan) dan Singapura. Walaupun keberadaan Atase ketenagakerjaan akan sangat membantu , namun perlu dicatat bahwa tidak secara otomatis masalah akan selesai. Rasio anantara petugas dengan TKI sangat fantastis, sebagai contoh di Malaysia seorang Atase harus mengurus satu juta TKI.

### Rekomendasi Penanganan/Pengurusan

Permasalahan TKI/TKW yang juga WNI bukanlah semata-mata menjadi persoalan Departemen Tenaga Kerja saja. Tetapi melibatkan antar instansi, seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri/melalui Pemerintah Daerah, serta pihak keamanan (Kepolisian), dan Instansi terkait lainnya.

Seperti yang diungkapkan WAKAPOLRI Komisaris Jenderal Polisi Makbul Padmanegara dalam kesempatan audiensi dengan TKI WATCH / sebuah LSM pemerhati masalah TKI di Mabes Pori beberapa waktu yang lalu : "dalam masalah TKI, disatu sisi merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik/lebih tinggi. Tapi kenapa mereka/masyarakat senang dengan prosedur yang tidak resmi/illegal, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan masalah ?! Dan tanpa mereka sadari pada akhirnya akan dapat menjadi korban *Trafficking*. Disinilah peran semua instansi terkait untuk dapat melakukan pembenahan, pencegahan dan penanganan



secara integral, termasuk Kepolisian harus mampu melakukan penegakan hukum sebagai bagian dari peran dan fungsinya."

Oleh karena itu prosedur penyiapan pemberangkatan calon TKI dapat lebih komprehensif, berupa pembekalan keterampilan dan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, serta hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja.

Sosialisasi yang kontinyu berupa kampanye penyadaran masyarakat melalui media, mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan untuk berangkat dan bekerja di luar negeri serta hak tanggung jawab sebagai tenaga kerja asing di luar negeri, kiranya perlu disampaikan ke masyarakat seluas-luasnya setidaknya di wilayah-wilayah yang telah menjadi kantong-kantong sumber TKI/TKW.

Unsur pengawasan yang lebih ketat dan sistematis terhadap penerbitan kartu

identitas dan paspor, didukung dengan sistem administrasi pendataan penduduk yang terintegrasi, akan dapat meminimalkan kasus-kasus yang akan timbul.

Peningkatan pengawasan yang ketat di titik-titik pintu keluar perbatasan oleh imigrasi dan aparat yang terkait lainnya, merupakan hal yang mutlak dilakukan, dalam hal ini pendataan ulang dapat di lakukan di pintu keluar dengan mencatat setiap WNI yang keluar khusus dengan tujuan bekerja.

Karena *Trafficking* dapat di katagorikan sebagai kejahatan luar biasa yang dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan, maka dalam rangka memberikan efek jera dan efek cegah, pelakunya perlu di tindak dengan hukuman yang seberat-beratnya

Peningkatan jumlah petugas yang terlibat dalam penanganan khusus kasus-kasus, harus di dukung dengan upaya-upaya peningkatan jejaring kerja dan *counterpart* di instansi-instansi terkait.

Khusus untuk pengiriman pelajar/mahasiswa dalam rangka Prakerin hendaknya dilakukan dibawah koordinasi Instansi yang ditunjuk dengan sistem pengawasan yang ketat, dilakukan langsung antara sekolah dan tempat praktek di LN dengan melibatkan perwakilan RI di Negara tujuan, agar dapat di monitor berbagi kegiatannya Dengan demikian hendaknya Prakerin pelajar/mahasiswa khususnya ke Malaysia segera ditertibkan dan di lakukan koordinasi sebaik-baiknya antar instasi terkait di Indonesia dengan melibatkan perwakilan RI di luar negeri. Di samping itu, dalam program Prakerin ini, khususnya dengan Malaysia, perlu adanya payung hukum antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dalam beberapa kesempatan pertemuan KBRI dengan instasi terkait Malaysia, pihak Malaysia menyatakan bahwa mereka tidak mengenal adanya Agen seperti tersebut di atas. Nampaknya dalam kasus ini, pihak Malaysia cenderung menyalahkan pihak sekolah di Indonesia yang dianggapnya telah melakukan pelanggaran keimigrasian Malaysia.

Membenahi semua itu tentu butuh waktu yang tidak sedikit. Namun demikian ada satu hal bisa ditanamkan kepada para TKI tersebut, yaitu harus ada kesadaran untuk memberitahukan keberadannya di Negara lain kepada kantor perwakilan RI di Negara tersebut. Misalnya sebuah coretan di selembar kertas tentang alamat dan nomor kantor perwakilan RI di Negara tujuan para TKI, harus menjadi bagian dari bekal mereka, karena nilainya akan sebanding dengan Paspor !\*\*\*

\* ( Oleh : Moch.Rizal Pahlevi. N - diolah dari laporan KBRI , Kuala Lumpur )





TKI ilegal yang mendapat amnesti sedang didata.

## Kasus TKI ILEGAL Ke MALAYSIA dengan Modus : *ON THE JOB TRAINING*

"Dengan dalih agar dapat bekerja di Malaysia dan modus operandi *ON THE JOB TRAINING*, 45 orang pelajar yang akhirnya menjadi korban yang rata-rata berumur dibawah 17 tahun, dibawa ke Malaysia oleh lembaga pendidikan pariwisata yang bernama The Bandung Hotel School (TBHS)".

Tidak tanggung-tanggung para pelaku yang bersekongkol ternyata hanya pernah bersekolah di lembaga pendidikan bidang pariwisata, tanpa ada tanda kelulusan alias tidak tercatat sebagai alumni lembaga pendidikan pariwisata.

Sebut saja diantara para tersangkanya, WIDY bertindak sebagai agen yang mencari tempat di Malaysia untuk *on the job training*, berdasarkan data tahun 1985 pernah terdaftar sebagai mahasiswa jurusan FO (Front Office) Diploma Satu di Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata yang sekarang bernama Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) dengan NIM 852660 tetapi sampai saat ini tidak ada keterangan lulus.

Begitu juga PRIYANTO yang bertindak sebagai Direktur The Bandung Hotel School (THBS), berdasarkan data tahun 1983 pernah terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Kitchen Diploma Satu pada Nasional Hotel dan Tourism Institute (NHTI) yang sekarang

bernama Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB).

Widy dan Priyanto yang sepakat membuat kerjasama pendirian The Bandung Hotel School (TBHS) yang bergerak di bidang perekrutan mahasiswa/siswa untuk melakukan *On The Job Training (OJT)* ke luar negeri seperti ke Malaysia, Singapura, dan Dubai.

Priyanto bertugas merekrut dan mengurus dokumen Passport, sedangkan Widy merupakan Agen di Malaysia yang akan mencari lokasi bagi penempatan OJT.

Para korban di tawari oleh pihak TBHS untuk mengikuti program OJT di hotel-hotel maupun restoran di luar negeri, seperti misalnya di Malaysia mereka disalurkan di hotel dan restoran seperti : Dynasti Hotel, Vistana Hotel, Akane Restaurant, Robert Harris café, King Briyani Restaurant dan lain-lain.

Modus penipuan tersebut akhirnya membuahkan hasil yakni pada tanggal 27 Juni 2007, telah diamankan oleh pihak imigrasi Malaysia sebanyak 14 (empat belas) orang WNI dalam razia yang dilakukan oleh Imigrasi Malaysia. Ke empat belas orang tersebut ternyata sedang melaksanakan OJT di King Briyani Restaurant Kuala Lumpur. Karena tidak dapat menunjukkan identitas diri (Passport) dan ijin dari

pihak berwenang di Malaysia, maka kemudian mereka di amankan di Camp Imigrasi Klia Sepang selama 16 (enam belas) hari, baru kemudian di serahkan ke KBRI Kuala Lumpur.

Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2007 juga telah diamankan kembali sebanyak 4 (empat) WNI dalam razia yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Malaysia di Robert Harris Café, milik MR Jesse Tan. Lagi-lagi keempat WNI tersebut tidak dapat menunjukkan Passport dan ijin dari pihak berwenang Malaysia. Dan lagi-lagi mereka mengaku sedang melaksanakan kegiatan OTJT (*On The Job Training*).

Tetapi untungnya, berkat kerja keras dan hasil koordinasi serta kerja sama pihak KBRI Kuala Lumpur dengan Imigrasi Malaysia, ke 18 (delapan belas) WNI yang di tahan di Camp Imigrasi di Klia Sepang telah diserahkan / dikembalikan ke KBRI Kuala Lumpur.

Namun pada tanggal 10 Juli 2007, kembali secara bertahap sebanyak 30 (tiga puluh) orang WNI telah datang ke KBRI Kuala Lumpur untuk meminta perlindungan.

Kasus ini cepat terbongkar atas kerjasama semua pihak yang terkait, termasuk kesaksian Ketua STPB ( Sekolah Tinggi pariwisata Bandung ) Drs. Upiek Haeryah Sadkar, MSC, disamping tentunya 45 orang siswa yang menjadi korban.

Adapun pasal yang dipersangkakan adalah :

- Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan atau pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
- Pasal 102 huruf (a) UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat)
- Pasal 378 KUHP (penipuan)
- Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional

Cukup berat juga pasal berlapis yang dilanggar oleh para pelaku. Dan ini merupakan peringatan keras bagi lembaga penyelenggara pendidikan pariwisata di tanah air agar hati-hati dalam menyelenggarakan program "*On the job Training*", jangan sampai terkena tuduhan seperti kasus diatas. Juga bagi orangtua yang mempunyai anak bersekolah di bidang pariwisata/perhotelan, agar semakin waspada dengan "*program on the job training*" yang ditawarkan oleh pihak Sekolah ! \*\*\*